

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Tujuan utama berdirinya suatu negara yaitu memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Meliputi berbagai aspek dalam kehidupan seperti kemakmuran, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Sehingga akan meningkatkan harkat dan martabat masyarakatnya sebagai manusia. Oleh karena itu pemerintah hadir sebagai suatu organisasi yang memegang kepercayaan dari masyarakat untuk merencanakan, menetapkan tujuan dan sasaran suatu pembangunan daerah yang lebih baik. Untuk tercapainya keberhasilan pembangunan tersebut maka segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan harus terlaksana dengan baik sehingga memenuhi kebutuhan dalam rangka pembangunan terhadap daerah. Pembangunan daerah merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah secara berkesinambungan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sehingga hasil yang diharapkan dari pembangunan tersebut harus difokuskan pada pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas.

Untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu wilayah dalam bidang pembangunan manusia dapat menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). IPM adalah indeks komposit (gabungan) untuk mengukur pencapaian kualitas pembangunan manusia untuk hidup secara lebih berkualitas, baik dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan maupun ekonomi yang tercermin dengan penduduk yang berumur panjang dan sehat, berpendidikan, dan mempunyai pendapatan untuk hidup

secara layak. Dengan adanya peningkatan kualitas manusia melalui program pembangunan manusia akan memberikan kontribusi besar dalam hal keberhasilan pembangunan di suatu wilayah, karena dengan adanya pembangunan manusia di berbagai aspek yang diukur melalui IPM akan menentukan keberhasilan pembangunan di suatu wilayah.

Berkaitan dengan pemerataan pembangunan, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan manusia, pemerintah berwenang dalam membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung terhadap aspek pembangunan manusia. Wewenang tersebut sepenuhnya telah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, karena pemerintah daerah lebih mengetahui karakteristik pembangunan manusia yang dibutuhkan untuk kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Hal tersebut sesuai dengan azas pemerintahan di Indonesia yang dilaksanakan dengan azas desentralisasi, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri namun dengan tetap melakukan koordinasi agar tujuan pemerintah berjalan secara efektif dan efisien. Dengan adanya pelimpahan wewenang tersebut pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan masyarakatnya melalui program-program pembangunan daerah yang telah direncanakan.

Berdasarkan Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No.32 tahun 2004 dan terakhir diperharui kembali dengan Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang dijelaskan bahwa pemberian wewenang untuk mengatur dan

mengurus pemerintahannya sendiri merupakan implementasi terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif demi mempercepat tujuan otonomi daerah. Disamping itu pemerintah juga telah menetapkan Undang-Undang No.33 tahun 2004 sebagai pembaruan dari Undang-Undang No.25 tahun 1999 yang menjelaskan tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana pemerintah daerah memiliki peluang yang besar untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki daerahnya sehingga sesuai dengan tujuan dari pemberian hak dan wewenang otonomi daerah.

Diperlukan manajemen keuangan pemerintah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel agar mampu mengendalikan kebijakan daerah untuk mewujudkan pembangunan melalui konsep otonomi daerah. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan melakukan pengendalian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena APBD merupakan wujud perencanaan penganggaran yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah sehingga menjadi pedoman dalam mengatur penerimaan dan belanja untuk pelaksanaan pembangunan daerah. Untuk itu penting mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan daerah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan di daerah adalah melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2007). Rasio keuangan daerah akan menggambarkan bagaimana kinerja

keuangan daerah dalam menjalankan dan membiayai pemerintahannya. Dengan adanya rasio keuangan daerah dapat dilihat hubungan kinerja keuangan daerah dengan tingkat kesejahteraan masyarakat daerah, karena wujud keberhasilan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dalam mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat akan erat kaitannya dengan Indeks Pembangunan Manusia.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No.22/1999 tentang otonomi daerah, banyak daerah di Indonesia yang mengusulkan diri untuk menjadi daerah otonom baru dengan tujuan mendapatkan kewenangan yang lebih besar dalam mengupayakan pembangunan dan kesejahteraan bagi daerahnya. Pembentukan daerah otonomi baru atau yang biasa disebut pemekaran daerah memungkinkan daerah untuk mengelola sumber daya yang tersedia di wilayah masing-masing sehingga dianggap sebagai salah satu jalan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Namun dengan masifnya pemekaran daerah yang terjadi dalam kurun waktu sejak diberlakukannya UU No.22/1999 tersebut salah satunya menyebabkan tingginya beban APBN (Anggaran Pengeluaran Belanja Negara) sehingga pemerintah mengambil kebijakan moratorium untuk menghentikan sementara laju pertumbuhan daerah otonom baru sejak tahun 2009. Seiring dengan berjalannya waktu evaluasi terhadap kesuksesan pembangunan daerah pemekaran harus tetap diperhatikan untuk melihat kesejahteraan masyarakat yang tercermin pada tingkat Indeks Pembangunan Manusiannya. Angka IPM disajikan untuk mengetahui posisi dan pencapaian

peta pembangunan antar daerah , dengan demikian diharapkan setiap daerah akan terpacu untuk berupaya meningkatkan kinerja pembangunan demi mencapai kesejahteraan masyarakat.

Di Provinsi Sumatra Barat, kabupaten/kota yang telah dimekarkan adalah dari 5 kabupaten/kota menjadi 10 kabupaten/kota. Hasil pemekaran dari kabupaten/kota tersebut, yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman (4 Oktober 1999), Kota Pariaman pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman (10 April 2002), Kabupaten Pasaman Barat pemekaran dari Kabupaten Pasaman (18 Desember 2003). Kabupaten Dharmasraya pemekaran dari Kabupaten Sawahlunto Sijunjung ( 18 Desember 2003), dan Kabupaten Solok Selatan pemekaran dari Kabupaten Solok (18 Desember 2003)

Daftar IPM Kabupaten dan Kota Pemekaran di Provinsi Sumatra Barat  
Tahun 2014-2019

No	Kab/Kota Pemekaran	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kab.Daharmasraya	69.27	69.84	70.25	70.40	70.86	71.52
2	Kab.Kep. Mentawai	56.73	57.41	58.27	59.25	60.28	61.26
3	Kab. Pasaman Barat	64.56	65.26	66.03	66.83	67.43	68.21
4	Kab. Solok Selatan	66.29	67.09	67.47	67.81	68.45	68.94
5	Kota Pariaman	74.66	74.98	75.44	75.71	76.26	76.70

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa IPM kabupaten/kota pemekaran di Suamtra Barat mengalami peningkatan semenjak tahun 2014 sampai tahun 2019. Meskipun tidak mengalami peningkatan yang cukup besar, namun peningkatan yang terlihat setiap tahunnya menunjukkan bahwa kabupaten/kota pemekaran di Sumatra Barat selalu berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna peningkatan pembangunan dari tahun ke tahun.

Alasan penelitian terhadap kinerja keuangan daerah kabupaten/kota pemekaran di Sumatra Barat dan pengaruhnya terhadap IPM dipilih karena pada penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak mengukur kinerja keuangan daerah kabupaten/kota dalam tingkat provinsi dan juga masih terdapatnya perbedaan hasil dari penelitian tersebut. Sehingga penulis ingin meneliti kembali dengan cakupan wilayah yang berfokus pada daerah pemekaran di Provinsi Sumatra Barat, Karena pada dasarnya pemekaran daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yang tercermin melalau tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMEKARAN DI SUMATRA BARAT DAN PENGARUHNYA TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PERIODE 2014-2019”**

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana rasio kemandirian keuangan daerah dan pengaruhnya terhadap IPM kabupaten/kota pemekaran di Sumatra Barat 2014-2019?
2. Bagaimana rasio derajat desentralisasi fiskal kabupaten/kota pemekaran di Sumatra Barat dan pengaruhnya terhadap IPM kabupaten/kota pemekaran di Sumatra Barat 2014-2019?
3. Bagaimana rasio efektivitas PAD dan pengaruhnya terhadap IPM kabupaten/kota pemekaran di Sumatra Barat 2014-2019?
4. Bagaimana rasio efektivitas pajak daerah dan pengaruhnya terhadap IPM kabupaten/kota pemekaran di Sumatra Barat 2014-2019?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui rasio kemandirian keuangan daerah dan pengaruhnya terhadap IPM kabupaten/kota pemekaran di Sumatra Barat 2014-2019.
2. Untuk mengetahui rasio derajat desentralisasi fiskal dan pengaruhnya terhadap IPM kabupaten/kota pemekaran di Sumatra Barat 2014-2019.
3. Untuk mengetahui rasio efektivitas PAD dan pengaruhnya terhadap IPM kabupaten/kota pemekaran di Sumatra Barat 2014-2019.
4. Untuk mengetahui rasio effektivitas pajak daerah dan pengaruhnya terhadap IPM kabupaten/kota pemekaran di Sumatra Barat 2014-2019.

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, dapat mengetahui dan memahami tingkat kinerja keuangan daerah kabupaten/kota pemekaran di Sumatra Barat dan hubungannya dengan IPM periode 2014-2019.
2. Bagi pemerintah kabupaten/kota pemekaran di Sumatra Barat, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan.
3. Bagi pihak lain, dapat dijadikan acuan dan referensi untuk penelitian berikutnya.

#### **1.4 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dibatasi pada kemampuan keuangan daerah kabupaten/kota pemekaran di Sumatra Barat dan hubungannya dengan IPM periode 2014-2019 dengan melihat tingkat kemandirian keuangan daerah berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang dianalisis dengan menggunakan rasio keuangan daerah yang diukur dengan menggunakan rumus perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD dan rasio efektivitas pajak daerah. Kemudian rasio keuangan tersebut akan dilihat hubungannya dengan angka IPM kabupaten/kota pemekaran di Sumatra Barat dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.



## 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memberikan gambaran yang jelas mengenai isi dari skripsi ini, pembahasan dilakukan secara komprehensif dan sistematis meliputi:

### BAB I : Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum isi dan penelitian ini.

### BAB II : Landasan Teori

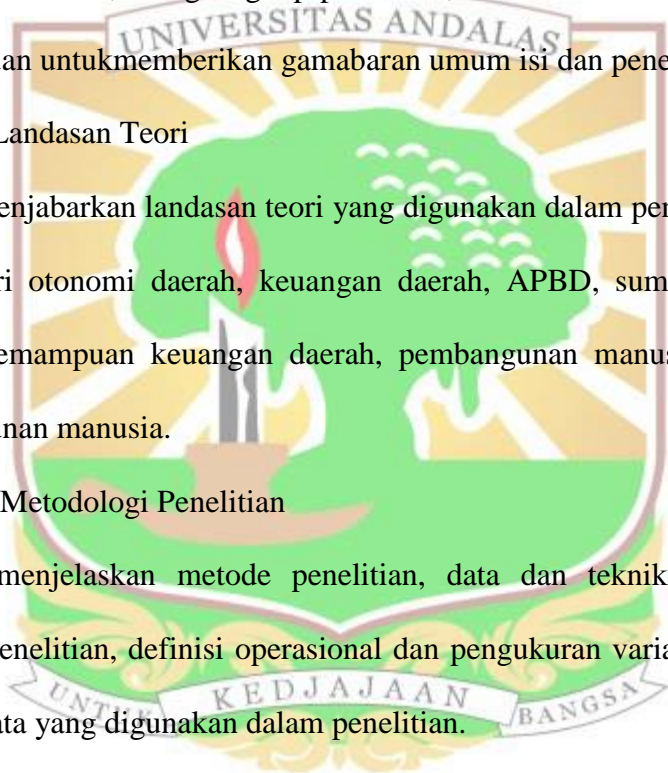
Bab ini menjabarkan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari otonomi daerah, keuangan daerah, APBD, sumber pendapatan daerah, kemampuan keuangan daerah, pembangunan manusia, dan indeks pembangunan manusia.

### BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan metode penelitian, data dan teknik pengumpulan, variabel penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

### BAB IV : Hasil Penelitian

Bab ini membahas analisis pengukuran dan pengolahan data serta pembahasannya yang merupakan interpretasi dari hasil pengolahan data tersebut. Interpretasi hasil penelitian ini akan memberikan jawaban atas permasalahan dari penelitian ini.



## BAB V : Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian secara keseluruhan dan juga keterbatasan yang dialami dalam penelitian serta saran-saran yang mungkin dapat menjadi bahan pertimbangan kedepannya berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

